

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Korporasi adalah sebuah kelompok atau perusahaan yang mendorong perekonomian dan memiliki potensi untuk membantu lingkungan sekitar. Tentu saja, tujuan utama dari setiap perusahaan, sektor, atau industri adalah untuk meningkatkan pendapatan. Tentu saja, bisnis sangat penting sebagai pelaku ekonomi dalam kelangsungan hidup masyarakat. Namun, setiap bisnis memiliki konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Bisnis berkontribusi secara positif ketika mereka membantu perekonomian negara berkembang dengan menambah lapangan kerja baru yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, serta operasi mereka sendiri dengan menawarkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Persaingan yang ketat di antara para pebisnis didorong oleh kemajuan teknologi dan industri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan perusahaan. Namun, perusahaan sering kali mengabaikan dampak sosial dari operasi mereka dalam upaya mereka untuk memajukan operasi ekonomi mereka. Kewajiban sosial perusahaan terhadap lingkungan, komunitas tempat perusahaan beroperasi, para pekerja, konsumen, dan pemerintah terkait dengan dampak sosial ini. Pihak-pihak ini, sering disebut sebagai lingkungan sosial perusahaan atau pemangku kepentingan, adalah 2 mereka yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap bisnis tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sihombing Halomoan, (2019) mengatakan “Tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan citra positif, namun jika tidak terkendali, hal ini dapat menimbulkan masalah jika tidak dilihat sebagai pusat keuntungan”. Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan perusahaan, perusahaan harus mengingat kewajibannya kepada masyarakat dan lingkungan tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan operasinya. Perusahaan harus dapat menunjukkan dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan sosialnya, baik secara positif (social benefit) maupun negatif (social cost). Dampak sosial yang positif adalah dampak yang diberikan perusahaan kepada lingkungan sosialnya, sedangkan dampak sosial negatif adalah dampak yang ditimbulkan perusahaan kepada lingkungan sosialnya, seperti kerugian atau gangguan. Semakin pentingnya masyarakat bagi dunia bisnis menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih bertanggung jawab. Hal tersebut membuat perusahaan harus menyeimbangkan antara keuntungan, pertimbangan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Masalah sosial perusahaan muncul seiring dengan perkembangan perusahaan, yang mempengaruhi hubungan mereka dengan lingkungan sosialnya, yang mengharuskan pemenuhan tanggung jawab sosial oleh setiap perusahaan. Agar perusahaan mendapatkan peluang keuntungan perusahaan akan melakukan berbagai macam cara, sehingga menyebabkan konsekuensi lingkungan yang positif dan negatif, seperti polusi, eksploitasi sumber daya alam, keracunan, dan polusi suara, jika tidak dikendalikan akan menimbulkan kerusakan bagilingkungan serta merugikan warga sekitar. Berkaitan dengan hal tersebut, peran akuntan semakin dibutuhkan, terutama untuk memperoleh informasi tersebut. Menurut standar akuntansi keuangan, akuntansi menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Ervina dkk., 2022). Salah satu contohnya adalah organisasi kepedulian sosial yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana organisasi atau bisnis tertentu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan komunitas, baik secara positif maupun negatif. (Sihombing Halomoan, 2019). Saat ini, akuntansi tanggung jawab sosial serupa dengan pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Praktik tersebut dipimpin oleh kerangka konseptual yang menekankan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus dapat diukur secara ilmiah. Akuntansi pertanggungjawaban sosial sangat berguna untuk melaporkan informasi mengenai sifat kontribusi baik positif atau negatif perusahaan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat, serta informasi digunakan untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan ketika dalam pengambilan keputusan. Ada tiga keuntungan dalam penerapan akuntansi 4 pertanggungjawaban sosial yaitu akuntansi pertanggungjawaban dapat menjadi dasar penganggaran, menjadi dasar penilaian kinerja manajer dan dapat menjadi motivasi dalam menjalankan organisasi dan entitas bisnis dengan lebih baik. Akuntansi tanggung jawab sosial merupakan perluasan dari akuntabilitas organisasi atau perusahaan yang melampaui lingkup pelaporan keuangan standar dan bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan selain pemilik modal, khususnya pemegang saham. Dalam rangka menyusun pengungkapan dalam laporan keuangan kuantitatif dan untuk mengukur faktor-faktor sosial, akuntansi pertanggungjawaban sosial menghadapi berbagai tantangan. Penyebab utama masalah pengukuran adalah ketidakmampuan untuk menilai semua komponen sosial dalam bentuk uang dan kurangnya standar akuntansi yang seragam untuk mengukur dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai peduli dengan lingkungan sosial mereka; mengingat pentingnya isu-isu sosial ini, kepedulian ini dapat dilihat dari kebijakan perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat dikuantifikasikan dan diukur secara kualitatif. Pengukuran kualitatif dilakukan dengan cara mengevaluasi rencana-rencana tanggung jawab

sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran kuantitatif lebih bersifat numerik dan cenderung menggunakan metrik tertentu untuk menghitung nilai-nilai seperti jumlah donasi yang disalurkan. 5 Negara Indonesia adalah negara hukum, yang membuat salah satu peraturan mengenai CSR dalam peraturannya mengenai CSR di Indonesia adalah Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yaitu Nomor 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perusahaan untuk dapat merancang dan melakukan rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dijelaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 juga menjelaskan tentang peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang memberikan panduan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. CSR Badan Usaha Milik Negara diatur sejak 1983 pada saat itu dimulai dengan Pembinaan Usaha Kecil (PUK) hingga BUMN PER09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN yang telah diperbaharui pada tanggal 08 April 2021 menjadi peraturan menteri BUMN PER-06/MBU/09/2022 tentang program Tanggung jawab Sosial (TJSL) BUMN hingga sampai sekarang menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam PER-6/MBU/09/2022. Perbedaan sasaran dan objek tanggung jawab sosial antara undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negeri BUMN tersebut terletak dari segi subjek perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial serta pelaksanaan tanggung jawab sosial itu sendiri. Sumber pendanaan tanggung jawab sosial, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) melaksanakan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 2-3% dari laba bersih setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang harus dibayarkan. 6 Setiap perusahaan penerapan corporate social responsibility (CSR) itu berbeda-beda, begitu juga antara perusahaan swasta dengan perusahaan milik pemerintah. Dalam penelitian ini akan memaparkan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada PT. Perkebunan Nusantara (PERSERO) III Medan, dimana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan milik negara yaitu (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yaitu (PT). Hal ini membuat perusahaan menjadi terbengkalai sebab perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan juga milik BUMN yang menuntut perusahaan ini harus memenuhi serta mewajibkan perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan harus sesuai dengan peraturan-peraturan serta undang-undang yang telah dibentuk. Alasan peneliti melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara (PERSERO) III Medan, adalah komitmen perusahaan ini yang begitu kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu misi serta prinsip-prinsip perusahaan salah satunya yaitu turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan. Sebelumnya peneliti

telah melakukan observasi pada PT. Perkebunan Nusantara (PERSERO) III Medan. Peneliti menemukan bahwa pada PT. Perkebunan Nusantara (PERSERO) III Medan yaitu perusahaan melakukan CSR pada tahun 2017 sebesar 1,2% dan 2018 sebesar 1,7% dimana masih jauh dari besaran dana CSR yang ditetapkan yaitu sebesar 2% - 7,3% sesuai peraturan UU No. 40 Tahun 2007 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: Tabel 1. 1. Laba Bersih dan CSR PTPN III 2017-2018 Tahun Laba Bersih CSR Persentase 2017 1.395.027.095.900 15.378.401.639 1,1% 2018 1.266.743.456.939 21.372.028.721 1,7% Sumber; Diolah dari data yang diperoleh bag. BSKR, 2022 Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui CSR yang dilakukan perusahaan pada tahun 2019 sampai 2021 apakah sudah sesuai dengan peraturan, serta adanya regulasi yang resmi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah penerapan pertanggungjawaban sosial perusahaan sudah sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 ? 2. Bagaimana penerapan akuntansi dalam bentuk pelaporan beban program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digunakan pada 8 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 ? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pertanggungjawaban sosial pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan UU 40 Tahun 2007. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pelaporan beban program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digunakan pada program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) periode tahun 2019 sampai dengan 2021. 1.4 Batasan Penelitian 1. Ruang Lingkup dari pengertian akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Linowes yaitu; sebuah proses pencatatan, pengukuran, analisis, dan pelaporan aktivitas-aktivitas sosial dan lingkungan dari suatu organisasi yang mempengaruhi kepentingan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Akan tetapi dalam penelitian ini akan dibatasi hanya dari segi penerapan akuntansi 9 tentang kesesuaian jumlah biaya sosial menurut UU PT, bentuk pelaporan beban pertanggungjawaban sosial yang digunakan oleh perusahaan yang diteliti. 1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti konsep teori melalui penggunaan konsep teori tersebut untuk membaca permasalahan pelaporan, supaya dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial di Universitas HKBP Nommensen Medan. 1.5.2

Manfaat Praktis Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : a. Bagi Peneliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) yang diwajibkan 10 oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan. b. Bagi Perusahaan. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada lingkungan dan masyarakat serta juga dapat menjadi alat analisis yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. c. Bagi Pembaca. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan tentang dan juga sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penulisan karya ilmiah tentang penerapan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal, sebagaimana dalam (Anggraeni, 2021) Mengutip Edi Suharto (2014:4) menjelaskan bahwa CSR adalah cara perusahaan untuk mengintegrasikan kesadaran sosial ke dalam operasi bisnisnya dan interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 12 Asterina, (2018) menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik”. Putri dkk., (2018) juga menyatakan “Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah kewajiban yang tersirat, ditegakkan, atau dipahami oleh manajer, bertindak sesuai porsinya, untuk melayani atau melindungi pemangku kepentingan dan segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan”. Definisi R. Wayne Mondy dalam Sihombing Halomoan, (2019) tentang “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah mandat atau perintah atau intruksi yang memberikan kepada para manajer, yang mengambil bagian dalam kapasitas mereka untuk membantu kelompok lain atau untuk merasakan sendiri”. Menurut Fatmawatie, (2017) “Tanggung jawab sosial merupakan suatu pemikiran bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat selain mencari

keuntungan. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai 13 kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat” . Pengertian Corporate Social Responsibility berdasarkan ISO 26000 adalah Tanggung jawab sebuah organisasi atau perusahaan atas dampak dari keputusan dan aktivitas organisasi atau perusahaan tersebut kepada masyarakat dan lingkungan, yang transparan dan perilaku yang mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, mematuhi standar perilaku internasional, mengintegrasikan prinsip-prinsip ini di seluruh organisasi, dan mempraktikkannya dalam hubungan antarpribadi di dalam organisasi adalah contoh-contoh tanggung jawab organisasi atau perusahaan atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. (Yuliana & Djalaluddin, 2019). Tanggung jawab sosial berdasarkan ISO 26000, yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab masalah sosial responsibility di dalamnya mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktik institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, tata kelola organisasi. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan salah satu isu, tanpa memperhatikan isu pokok lainnya maka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan masih belum berjalan dengan baik (Aminurosyah dkk., 2020). Berdasarkan menurut beragam macam definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) 14 merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholder dalam arti luas sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Dan menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) tidak fokus pada satu isu, tanpa memperhatikan ide pokok lain suatu perusahaan belum dapat dinyatakan telah menjalankan tanggung jawabnya.

2.1.1.1 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial di Indonesia

Pada periode-sebelum tahun 2007 kegiatan CSR adalah kegiatan voluntary (sukarela). Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kegiatan CSR menjadi kewajiban undangundang. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk dapat melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan saja, tetapi setiap umat manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Penjabaran konsep CSR di Indonesia mulai diatur di dalam Undangundang Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM), Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT),

dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL), Undang-undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut 15 UU BUMN) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per6/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUP: “Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Menurut Pasal 1 angka 3 UUP juga menjelaskan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Pasal 74 UUP pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut : 1. Perseroan wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial perseroan. 2. Tanggung jawab sosial perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggung jawab perseroan atas dampak kegiatan perseroan terhadap lingkungan, sosial dan kesehatan masyarakat serta tanggung jawab perseroan atas kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). 3. Perseroan menyisihkan dana tanggung jawab sosial perseroan sebesar (2%- 3%) dari laba bersih perseroan setelah dikurangi pembayaran pajak 16 penghasilan yang harus dibayarkan, yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perseroan. 4. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diatur dalam rencana kerja tanggung jawab sosial perseroan yang disusun setiap tahun dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham. 5. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dalam satu tahun sejak tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang saham. 6. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh perseroan secara langsung atau melalui lembaga atau badan yang dibentuk oleh perseroan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial perseroan diatur dengan peraturan pemerintah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan peraturan dari menteri BUMN PER5/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) bahwa Program TJSL BUMN bertujuan yaitu: a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum tata kelola bagi perusahaan. b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan

prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. 17 c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan. Pelaksanaan program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk yaitu: a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil. b. Bantuan kegiatan lainnya lainnya sebagaimana dimaksud melaksanakan dengan mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan. (Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 Tahun 2021)

2.1.1.2 Tujuan Tanggung Jawab Sosial

Adapun tujuan dari tanggung jawab sosial atau CSR adalah untuk memberi tahu masyarakat apa yang mungkin diklasifikasikan sebagai pengaruh buruk atau baik dari aktivitas tersebut. Dampak aktivitas bisnis dapat bersifat negatif, yang berarti menimbulkan biaya sosial bagi masyarakat, atau positif, yang berarti membawa manfaat sosial bagi masyarakat. Lebih khusus lagi, tujuan CSR adalah untuk mengukur dan melaporkan biaya dan manfaat sosial sehingga tindakan pencegahan yang diperlukan dapat diambil untuk memaksimalkan manfaat sosial. Tujuan CSR adalah mengevaluasi hasil kerja pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi perusahaan di masa mendatang.

2.1.1.3 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)

Manfaat yang diperoleh Dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, baik bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007, hal 99) dalam (Fatmawatie, 18 2017) memaparkan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya: a. Bagi Perusahaan. Ada empat manfaat yang bisa diperoleh perusahaan dengan menerapkan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan mampu tumbuh dan berkelanjutan serta citra positif perusahaan di masyarakat luas. Kedua, bisnis memiliki akses yang lebih mudah ke modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Keempat, bisnis dapat meningkatkan pengambilan keputusan atas hal-hal kritis (keputusan kunci) dan memfasilitasi manajemen risiko. b. Bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah suatu perusahaan di suatu daerah karena menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas sosial daerah tersebut. Hak-hak tenaga kerja lokal yang terserap sebagai tenaga kerja akan terjamin. Di mana ada masyarakat adat atau komunitas lokal, praktik CSR menghormati keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. c. Bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menjaga kualitas lingkungan dengan mengurangi tingkat pencemaran, bahkan dunia usaha juga turut serta mempengaruhi lingkungannya. d. Bagi negara. 19 Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut sebagai "corporate misconduct" atau pelanggaran komersial, seperti menyuap pejabat negara atau aparat penegak hukum, yang dapat mengarah pada korupsi yang serius. Selain itu, negara juga akan menikmati

penghasilan pajak perusahaan yang wajar (tidak digelapkan). 2.1.1.4 Prinsip - Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Implementasi tanggung jawab sosial atau CSR membutuhkan landasan yang kuat, agar pemahamannya tidak menjadi syarat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia. CSR mengenal berbagai prinsip dalam penerapannya sebagai konsep yang belum diterapkan oleh dunia bisnis, pemerhati lingkungan atau bahkan perkembangan organisasi global. Menurut Hery, (2017) beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab sosial atau CSR dapat dijelaskan sebagai berikut : Transparency. Transparansi berarti dampak dari tindakan tidak dibedakan dari fakta dan pelaporan atas tindakan tersebut, dan diketahui oleh pihak internal maupun eksternal. Transparansi adalah hal yang penting supaya seluruh dampak atas aktivitas yang telah dilakukan organisasi harus dapat terlihat jelas dari informasi yang disajikan. Accountability. Implikasi dari akuntabilitas adalah sebuah pelaporan kuantifikasi atas dampak dari tindakan yang diambil perusahaan kepada pihak internal dan 20 eksternal. Akuntabilitas penting untuk membangun dan melaporkan pengukuran yang tepat dan berguna dalam pengambilan keputusan. Sustainability. Sustainability atau keberlanjutan memperhatikan dampak dari tindakan yang dilakukan sekarang terhadap masa depan. Sumber daya yang terbatas jumlahnya harus digunakan secara bertanggung jawab demi keberlangsungannya di masa mendatang. Yang dapat dilakukan demi keberlanjutan adalah mencari alternatif yang dapat menggantikan sumber daya terbatas. Keberlanjutan berarti masyarakat tidak boleh menggunakan sumber daya yang terbatas secara berlebihan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya keberlanjutan adalah meningkatkan efisiensi dari sumber daya yang digunakan. 2.1.1.5 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut IASB (International Accounting Standards Board), pengungkapan adalah penyajian informasi yang relevan secara jelas di dalam laporan keuangan atau laporan lainnya untuk membantu pemahaman pembaca terhadap posisi finansial, kinerja, dan arus kas suatu entitas (Sottoriva, 2018). Bagian dari pengungkapan adalah ada yang berbentuk wajib (mandatory), yaitu. pengungkapan informasi merupakan tugas perusahaan berdasarkan peraturan atau standar tertentu, dan sebagian berbentuk sukarela (voluntary), yaitu pengungkapan informasi tambahan oleh perusahaan. 21 Setiap pebisnis ekonomi berusaha juga untuk mementingkan pemegang saham dan berpusat pada pencapaian laba selain itu juga mampu bertanggungjawab secara sosial terhadap masyarakat sekitar, maka hal seperti ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan. 2.1.2 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Akuntansi sosial atau Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan hal atau fenomena baru dalam ilmu akuntansi. Selama ini berbagai definisi akuntansi sosial telah digunakan dalam berbagai literatur.

Pakar akuntansi dan sarjana telah mengusulkan beberapa definisi akuntansi sosial: Menurut Sofyan (2005) dalam (Mariam, 2011) Akuntansi Sosial merupakan bidang ilmu akuntansi yang bertujuan akuntansi sosial adalah untuk menemukan, mengukur, menilai, dan menyajikan manfaat dan biaya sosial yang dihasilkan oleh organisasi atau bisnis tertentu. Fungsi institusi (perusahaan dan non perusahaan) dalam meningkatkan standar akuntansi, kehidupan masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis dan pengungkapan pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan makro pada kegiatan pemerintah maupun perusahaan. Kegiatan pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara, mencakup akuntansi sosial dan pelaporan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan 22 melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup, financial, managerial social accounting dan social auditing (Fatmawatie, 2017). Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial atau yang disebut juga akuntansi sosio ekonomi, yaitu: “Proses pemilihan variabel, ukuran, dan prosedur pengukuran yang menentukan tingkat kinerja sosial perusahaan, secara sistematis mengembangkan informasi yang berguna dalam menilai kinerja sosial perusahaan, dan mengkomunikasikannya kepada berbagai kelompok masyarakat di dalam dan di luar perusahaan yang dipengaruhinya.” Selain itu, ilmu “Socio Economic Accounting (SEA) adalah bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan berusaha untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan manfaat sosial dan biaya sosial yang dihasilkan oleh organisasi”. (Fatmawatie, 2017) Menurut Ebimobowei dalam (Anggraeni, 2021) bahwa “Akuntansi Sosial adalah berkaitan dengan pengembangan sistem pengukuran untuk memantau kinerja sosial” Sementara Gray mengemukakan bahwa “Akuntansi sosial sebagai penyiapan dan publikasi accounting organisasi tentang sosial, lingkungan, interaksi pemangku kepentingan karyawan, masyarakat, pelanggan dan kegiatan lainnya”. Kemudian Alexander dan Britton dalam (Anggraeni, 2021) mengatakan “Akuntansi sosial sebagai pelaporan biaya-biaya dan manfaat yang dapat atau tidak dapat diukur dalam bentuk uang, yang timbul dari kegiatan ekonomi dan secara substansial ditanggung atau diterima oleh masyarakat dalam kelompok 23 besar atau tertentu yang tidak memegang hubungan langsung dengan entitas pelapor” Menurut Linowes dalam (Harahap, 2016) juga menyatakan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah sebuah proses pencatatan, pengukuran, analisis, dan pelaporan aktivitas-aktivitas sosial dan lingkungan dari suatu organisasi yang mempengaruhi kepentingan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam jangka

panjang. Akuntansi pertanggungjawaban sosial ini mencakup segala aspek aktivitas sosial organisasi yang mencakup lingkungan, masyarakat, karyawan, dan konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat tentang dampak sosial dan lingkungan dari organisasi, sehingga dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Menurut (Brewer & Garrison, 2013), akuntansi pertanggungjawaban sosial atau social accounting merupakan suatu proses pengumpulan informasi, pengukuran, dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan suatu organisasi kepada pemangku kepentingan stakeholder. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh operasional organisasi tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban sosial juga mencakup pencatatan informasi tentang tindakan organisasi terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti kebijakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, program kepedulian sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, social accounting juga dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan mereka serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Dari pengertian akuntansi sosial yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sosial itu adalah suatu laporan yang melaporkan seluruh kegiatan sosial suatu lembaga atau perusahaan yang berdampak negati atau berdampak positif perusahaan itu terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal serta keuntungan dan kerugiannya bagi lingkungan hidup akibat dari pengguna sumber daya alam dan sumber daya manusia oleh industri dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan termasuk stakeholder, karyawan, masyarakat, dan pemerintah melalui suatu laporan pertanggungjawaban sosial. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam definisi tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial, pada prinsipnya memiliki persamaan dalam karakteristiknya seperti yang ditulis oleh: 1. Menilai dampak sosial dari kegiatan-kegiatan perusahaan. 2. Mengukur efektifitas dari program perusahaan yang bersifat sosial. 3. Melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. 4. Sistem informasi internal dan eksternal yang memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber daya

25 2.1.2.1 Munculnya Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Dalam pengembangan perusahaan komersial dalam bentuk PT, yaitu masyarakat dan investor perusahaan. Layanan keuangan berbeda dari pekerjaan manajemen, yang disebut perubahan pengelolaan. Dalam hal ini pemegang saham tidak lagi berpartisipasi dalam program pengelolaan itu menciptakan kebutuhan membuat laporan keuangan sebagai metode pertanyaan manajer dan karyawan pemegang saham. Setiap aktivitas perusahaan secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan

lingkungan sosialnya. Sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban harus memberikan pertanggungjawaban atas semua sumber daya yang telah digunakan serta hasil-hasil yang telah dicapainya. Dikutip oleh Usmansyah (1989:6) dalam (Kristiana dkk., 2014) 2.1.2.2 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Menurut (Harmadji, 2020) akuntansi pertanggungjawaban sosial ada memiliki tujuan yaitu: 1. Sumbangan sosial netto periodik diukur dan diidentifikasi dari suatu perusahaan, bukan hanya meliputi biaya dan manfaat yang diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga yang timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda. 2. Membantu perusahaan apakah praktek dan strategi yang menentukan secara langsung yang mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan 26 sosial adalah konsisten dengan prioritas-prioritas sosial pada satu sisi dan aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya. 3. Menyediakan semua kelompok dalam masyarakat dengan informasi penting tentang tujuan, kebijakan, program, hasil dan kontribusi untuk penyebab sosial perusahaan dengan cara terbaik. 2.1.2.3 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Begitu juga dengan manfaatnya menurut Hamdani, dalam (Anggraeni, 2021) pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang, terutama bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Uraianannya sebagai berikut: a. Manfaat bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial akan memunculkan citra positif dari masyarakat karena keberadaan perusahaan memberikan kontribusi yang positif masyarakat bagi masyarakat. Selain membantu ekonomis masyarakat, perusahaan juga dianggap mampu membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa mendatang. Akibatnya perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu pada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap menawarkan sesuatu untuk dibeli masyarakat, tetapi juga akan dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perubahan bagi masyarakat. b. Manfaat bagi masyarakat. Selain mendapatkan perhatian dari perusahaan, manfaat tanggung jawab sosial bagi masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru bahwa 27 mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli saja. Saat ini hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksplotasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun hubungan masyarakat lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lainlain. c. Manfaat bagi pemerintah. Pemerintah tidak hanya sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, akan tetapi pemerintah dapat memberikan sanksi bagi pihak yang

melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

2.1.2.4 Ruang Lingkup Akuntansi
Pertanggungjawaban Underdown dan Glautier (1986) dalam (Kristiana dkk., 2014) mengungkapkan ada lima bidang-bidang sosial terdiri dari :

- Sumbangan untuk laba bersih (net profit contribution) Mengukur efektifitas mulai sejak rencana perusahaan yang bersifat sosial. Melaporkan sudah berapa jauh perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Sistem informasi internal dan eksternal mungkin akan mempengaruhi penilaian seluruh sumber daya
- 28 · Sumbangan terhadap sumber daya manusia (human resources contribution) Ini memperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Meliputi: pengangkatan pegawai, program pelatihan, pemberian upah dan gaji secara layak, kebijakan promosi jabatan dan rotasi tugas, keamanan kerja, pelayanan kesehatan yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain-lain
- Sumbangan terhadap public (public contribution) Meliputi bidang-bidang yang menampakkan kegiatan perusahaan terhadap (kelompok) individu di luar perusahaan, yang antara lain meliputi: kegiatan kemanusiaan umum, praktek peluang kesempatan kerja yang adil, pembayaran pajak kepada pemerintah dan sebagainya.
- Sumbangan terhadap lingkungan (environmental contribution). Meliputi pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan produksi yang meliputi pemakaian sumber daya, proses produksi, dan produksi yang mencakup kegiatan daur ulang, penanggulangan pencemaran dan pemeliharaan lingkungan tempat perusahaan berdiri dan beroperasi.
- Sumbangan terhadap barang atau jasa Meliputi aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengamanan dan
- 29 pelayanannya yang diupayakan sebaik mungkin sesuai peran yang diemban, serta mencakup pula kepuasan pelanggan, kejujuran perusahaan dalam periklanan, kelengkapan dan kejelasan dalam pemberian segel dan pembungkusan

2.1.2.5 Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Format laporan tanggung jawab sosial belum ditentukan. Di Amerika, pusat akuntansi dunia, praktik pelaporan masih dilakukan secara berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Beberapa penjelasan laporan keuangan menyertakan laporan aktivitas atau data sosial kualitatif sebagai catatan kaki atau informasi tambahan. Ada yang melakukannya secara sederhana dan ada yang melakukannya secara rumit. Menurut Nur, (2012) dalam (Belda dkk., 2017) Laporan tanggungjawab sosial ialah aktivitas-aktivitas tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan permasalahan dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan

tahunan (annual report) yang dipertanggungjawabkan direksi didepan sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang dilakukan selama tahun terakhir. Sebuah metode yang dihitung untuk melaporkan kegiatan atau aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempublikasikan tindakan tanggung jawab sosial dan tujuannya, serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sofyan Safri Harahap ada beberapa teknik atau bentuk pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah sebagai berikut: 1. Pengungkapan dalam syarat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya. 2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi aspek sosial perusahaan yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pada umumnya tentang aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat menimbulkan pengeluaran luar biasa di masa depan atau kewajiban kontinjensi. Metode ini konsisten dengan prinsip full disclosure dalam akuntansi yang mengimplikasikan perlunya modifikasi dan reklasifikasi perkiraan-perkiraan laporan keuangan bila terjadi perubahan kondisi yang menimbulkan kebutuhan informasi baru. 3. Dibuat dalam perkiraan tambahan. (Rahman, 2020) Menurut Martin Friedman Siegel (2015:17) dalam (Anggraeni, 2021) ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial beserta uraiannya, berikut yaitu : 1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit). Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi-operasi yang dilakukan perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. 2. Laporan Sosial (Social Report). Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktis. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum menjadi empat kelompok sebagai berikut : a. Inventory Approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling dasar dan sederhana dimana dampak sosial diidentifikasi dan dijelaskan. Pendekatan ini digunakan untuk mendaftar dan menjelaskan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap masing-masing pihak di dalam lingkungan. b. Outlay Cost Approach. Pada pendekatan ini yang diperhatikan adalah biaya-biaya yang timbul dari kegiatan perusahaan yang mempunyai hubungan dampak sosial. Pendekatan ini umumnya membandingkan biaya-biaya sosial antar periode. Namun pada pendekatan ini tidak terlihat jelas pengeluaran yang mempunyai dampak positif dari mana yang

mempunyai dampak negatif. c. Social Program Management Approach. 32 Pendekatan ini perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu. d. Cost Benefit Approach. Perusahaan mengungkapkan aktivitas memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat social yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap masyarakat.

3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Keuangan (Disclosure In Annual Report). Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim atau laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui media massa.

2.2 Penelitian Terdahulu Berikut ini, beberapa ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial yang menjadi referensi bagi peneliti tertera pada Tabel 2.1. Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu

33 No Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 1 Asterina Lidya (2018) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sosial pada lingkungan (studi kasus PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar) PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar telah melakukan kegiatan yang mencerminkan kepedulian sosial perusahaan, salah satunya menerapkan Corporate Social Responsibility, yang telah diwujudkan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar telah melakukan beberapa aktivitas-aktivitas sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan.

2 Abdul Aziz Siregar (2017) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan implementasi akuntansi tanggung jawab sosial (social responsibility accounting) pada PT Perkebunan Nusantara III dan menganalisis aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan serta praktik akuntansinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan pemerintah dan memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan. Studi ini merekomendasikan pengembangan format standar untuk akuntansi tanggung jawab sosial.

34 No Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 3 Halomoan Sihombing (2019) Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Regional I Dalam hal laporan CSR, PT. Telkom Regional melaporkan biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

menunjang aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan. Berdasarkan pengamatan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan maka elemen-elemen yang terkandung di dalam laporan biaya sosial dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: Kontribusi kepada Masyarakat, Kontribusi kepada Lingkungan Hidup dan Kontribusi kepada Sumber Daya Manusia

4 Susi Yanti Romauli Panjaitan (2019) Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan (csr) pada PT. Kencana Agri (Studi Empiris Pada Perusahaan Kencana Agri Tahun 2015- 2017) PT. KENCANA AGRI telah melakukan tanggung jawab sosial (CSR) sesuai regulasi KEPMEN BUMN NO. KEP236/MBU/2003. Selain itu perusahaan belum menerapkan pelaksanaan akuntansi untuk kepentingan CSR sehingga biaya-biaya tersebut CSR dibuat dalam bentuk laporan penggunaan dana CSR.

35 No Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 5 Yudi Rahman (2020) Peranan Perilaku Sosial PT. Armada Mix Banjarbaru Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya. PT. Armada Mix Banjarbaru telah melakukan beberapa aktivitas-aktivitas berupa kontribusi perusahaan untuk masyarakat, kontribusi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kontribusi perusahaan terhadap sumber daya manusia, serta kontribusi perusahaan terhadap produk dan jasa.

6 Sarima Gurning (2018) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PTPN IV (Persero) Unit Usaha Bandar Pasir Mandoge PTPN IV Unit Usaha Bandar Pasir Mandoge telah melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya yang terkait dengan masyarakat, lingkungan maupun karyawan yang terdapat pada perusahaan, hal tersebut dilihat dari anggaran yang disediakan perusahaan pada tahun 2016 adalah senilai Rp. 238.106.000

36 No Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 7 Maria Anastasia dan Sriyunia Anizar (2022) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Corporate Social Responsibility pada PT. Tarungin Bina Mitra PT. Tarungin Bina Mitra Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang telah dan seharusnya berdasarkan UU No.40 Tahun 2007. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangan pada periode akuntansinya belum ada penerapan khusus pertanggungjawaban kepada masyarakat (CSR), perusahaan hanya mengeluarkan biaya operasional dan umum untuk kepentingan manajemen perusahaan seperti kegiatan rutin. Kegiatan buka puasa, santunan insidental, dan hari besar nasional yang diajukan, sedangkan CSR ditargetkan hanya pada masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan.

8 Rahmawati, Sapar, Dwi Cahyo Nugroho (2015) Analisa Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada PT. Vale Indonesia, Tbk PT. Vale Indonesia Tbk mengungkapkan CSR untuk tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 pada program keselamatan kerja karyawan dan bidang pelestarian alam konstan dari tahun ke tahun dengan persentase 100%

dengan terlaksananya semua kegiatan. 37 No Nama Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 9 Herawati, Alma, Alysa, Giovani, Ida, Arim (2019) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) d Perusahaan Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti usia perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, permintaan karyawan, kebijakan pemerintah, budaya organisasi, dan permintaan pelanggan mempengaruhi implementasi CSR. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa CSR dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan dan meningkat reputasi perusahaan. Namun penelitian ini juga mengakui bahwa ada perbedaan dalam faktor-faktor CSR yang diterapkan oleh setiap Perusahaan. 10 Shafira dan Dr. Drs. Roekhudin (2019) Analisa Pengungkapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Global Reporting Initiative (Gri) 4.0 Pada Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2013- 2017 Hasil Penelitian mengatakan PT telkomIndonesia (Persero) telah melaksanakan kegiatan CSR selama periode yang diteliti yakni tahun 2013-2017 dan mengungkapkannya dalam laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan pedoman GRI 4.0 38 2.3 Kerangka Berpikir Kerangka berpikir merupakan langkah-langkah dalam penelitian dimulai dengan adanya minat untuk mengetahui permasalahan atau fenomena tertentu dan berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, pembahasan dan kesimpulan. Dalam gambar 2.1 dikemukakan alur penelitian yang akan digunakan sebagai pembahasan dan menganalisis data pada penelitian : Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir Sumber : Didesain Penulis Perusahaan memiliki tanggung jawab pada masyarakat serta lingkungannya, dan tidak sekedar hanya mencari keuntungan. Pasal 47 UU Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan tentang besaran dana CSR sebesar 2-3% PTPN III melakukan pertanggung jawaban sosial dengan range 1,2% yang masih di bawah standar Mengevaluasi kesesuaian penerapan akuntansi pertanggungjawaban (UU 40 Tahun 2007) Menganalisis bentuk pelaporan pengungkapan yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian Penelitian ini tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, berada di lokas Jalan Sei Batang Hari No. 2, Simpang Tanjung, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini berlangsung selama satu semester tahun ajaran 2022/2023

3.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi merupakan ciri-ciri, sifat, keadaan, atau gambaran objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek penelitian. Data jenis ini berasal dari hasil observasi, wawancara dan konsultasi terhadap pihak yang berada di PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

3.3 Metode Pengumpulan Data Menurut Sudaryono, (2021;215) metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik engumpulan data, maka peneliti tidak akan 40 mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dokumen yang diperlukan sebagai bahan data tergantung pada masalah penelitian. Tentang beberapa informasi yang diterima yaitu pelaksanaan biaya CSR, laporan keuangan perusahaan, struktur organisasi dan pengawasan perusahaan di PT. Perkebunan Nusamtara III (Persero) Medan dan Laporan Tahunan dan Laporan Tanggung Jawab Sosial 2019-2021 dan Laporan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Wawancara. Wawancara digunakan untuk mengeksploitasi penerapan dan penerapan serta hambatan terkait CSR PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Wawancara ini dilakukan bebentuk terstruktur dan tidak terstuktur berikut daftar tabel wawancara : 41

Tabel 3. 1. Daftar Wawancara No. Daftar Wawancara 1. Berapa Kali program TJSL dilaksanakan dalam 1 Tahun ? 2. Apa faktor yang membuat program PKBL diganti menjadi TJSL ? 3. Apakah TJSL membawa dampak lebih baik dari pada PKBL ? 4. Siapa saja dan bagaimana pihak yang menerima dana TJSL ? 5. Seperti apa bentuk pelaporan CSR ? 6. Seperti apa bentuk bantuan CSR dilakukan ? 7. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan aturan hukum? 8.

Dibutuhkan berapa lama untuk menentukan diterimanya bantuan yang diberikan ? 9. Apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan RKA ? 10. Apa kendala dalam menjalani TJSL ? 11. Kalangan mana saja yang dapat menerima bantuan TJSL ? 12. Apa manfaat yang diterima perusahaan atas terlaksananya program TJSL? 13. Dari mana sumber dana TJSL ? 14. Berapa persen dana yang disisihkan perusahaan untuk CSR ? 15. Bagaimana pendapat Anda tentang prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban sosial yang diterapkan oleh perusahaan? Apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU 40 Tahun 2007? 16. Sektor apa saja yang menerima bantuan kegiatan ?

3. Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan seluruh teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuannya untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Baik itu dengan melakukan wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

42 3.4 Teknik Keabsahan Data Sudaryono, (2021) mengungkapkan data hasil wawancara beserta jawabannya tersebut selanjutnya dilakukan uji atau pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan Uji kredibilitas (credibility), dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Tujuan teknik triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruksi penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

3.5 Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis metode penelitian deskriptif yang 43 digunakan adalah studi eksplorasi adalah jenis penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan secara mendalam. Dimana peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami lebih mendalam mengenai suatu fenomena yang belum banyak diketahui atau dipelajari sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif

dengan desain deskriptif studi eksplorasi, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, atau dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang ingin diteliti. Kemudian data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan-temuan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan mengikuti arahan dari Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2022) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh yaitu sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data (Data Collection). Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data baik secara wawancara mendalam dan dokumentasi. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. 2. Reduksi data. Reduksi data adalah proses pengolahan data yang didapatkan dari hasil observasi atau penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dimana data yang sudah terkumpul dan terekam saat melakukan penelitian di perusahaan, selanjutnya dirangkum dan diseleksi untuk menentukan data-data pokok yang sesuai dengan kebutuhan. Usai direduksi, peneliti harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. 3. Penyajian data. Pada tahap ini, peneliti dapat menentukan jenis serta bentuk data atau dokumen. Pengumpulan data atau dokumentasi dipandang sebagai kumpulan informasi yang akurat dan terkini yang telah disetujui dan diklasifikasikan untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data bagi para peneliti. 4. Menarik Kesimpulan. Selama penelitian berlangsung makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kesamaannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.